Pemilu Alternatif ala Bung Hatta:

Musyawarah Mufakat secara Bottom up,

Berbasis Desa-Kelurahan,

Murah,

Mudah dan

Lebih Demokratis

DEMOKRASI ASLI INDONESIA DAN
KEDAULATAN RAKYAT (Mohammad Hatta)

By Sejarawan Muda on 23 Juni 2011



INSPIRASI dari tulisan Bung Hatta, Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat

Daftar Isi

- Partisipasi Pemilih Rendah (hal 3)
- Krisis Demokrasi (hal 4-5)
- Latar Belakang: Kondisi Pemilu Saat ini (hal 6):
 - Pemilu yang MAHAL: Biaya KPU, Biaya Partai, Biaya Kandidat (hal 7-12).
 - Dampak Pemilu Mahal dan Sulit: Bunuh Diri,
 Korupsi dan Konflik Kerusuhan (hal 13-18)
 - Pemimpin Hasil Pemilu Langsung: Tersangka dan Pecah Kongsi (hal 19-20)
 - Pemilu SULIT Untuk: Validasi DPT, Distribusi Logistik Pemilu, Verifikasi Kecurangan (21-26)
 - Pemilu Perusak Birokrasi: Polarisasi Birokasi dan Jual-beli Jabatan di Birokrasi (27-28)
 - Pemilu Langsung Memecah NKRI (29)
- Kebutuhan Mencari Pemilu Alternatif
 (hal 30):
 - Pernyataan dari Prof. Machfud MD
 - Hasil Musyawarah Nasional PBNU 2012.

- Bagaimana Dengan Pemilu
 Alternatif Bung Hatta (hal 33):
 - Sesuai dengan Sila 4 dan Prinsip
 Musyawarah untuk Mufakat (hal 35)
 - Kata-Kata Kunci Bung Hatta (36-38)
 - Bagaimana Proses dan Ciri Pemilu Ala Bung Hatta (39-43)
 - Berbasis Desa-Kelurahan (44)
 - Tidak Wajib Partai (45)
 - Pemilu yang MUDAH (46)
 - Pemilu yang MURAH (47-48)
 - Pemilu yang LEBIH DEMOKRATIS (49)
 - SARINGAN BERLAPIS Wakil Rakyat (50)
 - Pemilu Menjamin Kokohnya NKRI (52-59)
 - Pemilihan Pemimpin yang Sesuai Adat
 Istiadat dan Nilai Masyarakat Setempat (60)
- Perbandingan Pola Pemilu (hal 63-68)
- Contact (hal 70)

Partisipasi Pemilih Rendah

Tahun	Propinsi/Kab/Kota	Partisipasi Pemilih	Tidak Memilih
2013	Prop Sumatera Utara	47.75%	52.25%
2013	Prop Riau	50%	50%
2013	Kota Palembang	65%	35%
2010	Kab Sukabumi	63.19%	36.81%
2010	Kab Indramayu	64.29%	35.71%
2010	Kota Depok	54.28%	45.72%
2008	Prop Riau	59%	41%



Prof Machfud dan Krisis Demokrasi

Pidato Kebudayaan 2012 oleh Moh. Mahfud MD: Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita

Submitted by admin on Thu, 11/08/2012 - 00:01



Pidato Kebudayaan 2012 oleh Moh. Mahfud MD: "Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita"

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Taman Ismail Marzuki ke-44, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) bekerja sama dengan Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM), menggelar *Pidato Kebudayaan 2012° dengan pembicara Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., pada Sabtu, 10 Nopember 2012 pukul 19.30 WIB di Graha Bhakti Budaya, TIM.

Moh. Mahfud MD akan berbagi buah pikirannya pada pidato kebudayaan kali ini, yang bertajuk "Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita*. Lewat pidatonya, Mahfud MD mengajak kita untuk melihat kembali penerapan demokrasi di Indonesia saat ini, yang ia sebut tengah mengalami krisis. Ada yang menyebut, demokrasi kita mandek. Ada yang menyebut, demokrasi

sekarang cenderung liar dan kebablasan. Banyak rambu-rambu demokrasi diterobos dengan dalih demokrasi. Tidak sedikit yang mengatakan, demokrasi dianggap melenceng daridemokrasi Pancasila, karena aroma liberal begitu kental.

Mahfud MD: Rakyat Berdaulat Hanya 5 Menit

Minggu, 11 November 2012, 09:33 WIB



Mahfud MD (tengah)

Berita Terkait

Dikecam Pejabat Istana, Ini Jawaban Mahfud MD

Mahfud: Tak Ada yang Bisa Melarang Saya Berbicara

REPUBLIKA CO.ID. JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengkritisi buruknya sistem demokrasi Indonesia saat berpidato di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam pidatonya vang bertajuk 'Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita', Mahfud mengatakan rakyat Indonesia berdaulat hanya selama lima menit.



Prof Machfud tentang PEMILU

Rakyat Pilih Serigala, Buaya, atau Ular Berbisa



Ketua Mahkamah Konsistusi Moh Mahfud MD

KOMPAS.com — Sekitar 30 menit, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menggulirkan pemikiran sekaligus keresahannya yang "menelanjangi" elite politik dalam pidato kebudayaan berjudul "Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita" di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Sabtu (10/11/2012) malam. Tanpa kehadiran tokoh elite politik, acara Hari Ulang Tahun Ke-44 TIM diselenggarakan oleh Dewan Kesenian

TERKAIT:

- · Mahfud Bantah Cari Popularitas
- Mafia Narkoba Disebut Masuk Istana RI 1, Sudi Terbina
- Mahfud: Mafia Narkoba "Gentayangan" di Penegak Hukum
- · Mahfud: Ola Harus Diadili Lagi dan Dihukum Mati

LATAR BELAKANG

(Kondisi Pemilu Saat Ini)

Pemilu yang SANGAT MAHAL



Biaya KPU

Biaya Partai

Biaya Kandidat

Bandingkan Porsi Anggaran KPU di APBD!



Pemilukada Sumut 7 Maret 2013, Butuh 700 Miliar Written by font size . Print Email . Share Be the first to comment

APBD Sumut 2014 Rp 8,4 Triliun

Sabtu, 16 Maret 2013 11:09 WIB

Wow! Dana Pemilu 2014 Rp16 Triliun

Mulya Achdami — HARIAN TERBIT







DPR Sahkan APBN 2014 Rp 1.842,2 Triliun

Jumat, 25 Oktober 2013, 14:57 WIB Komentar: 0 P

23 Dec 2013 | 22:51 WIB







Anggaran KPU VS Anggaran Dinas/Kementerian Lainnya

Nasional (2014)

Pemilu (2014)		Anggaran Kementerian	
KPU	16T	Kehutanan	4.97T
Bawaslu	3.26T	Riset Teknologi	4.37 T
Polisi untuk Pengamanan Pemilu	3.59T	Perindustrian	2.62T
Total	22.85 T	Perdagangan	2.2 T
		Koperasi & UKM	1.43 T
		Lingk Hidup	0.9 T
		Total	16.49T

Provinsi

	Jabar	Sumut	Sulsel
KPU	666 M	700 M	337 M
APBD	10 T	8.4 T	5 T
% KPU/ APBD	6.66 %	8.3 %	6.74 %
Anggaran Dinas			
Kesehatan		178.1 M	
Pertanian		147.6 M	
Perhubungan		14.2 M	
Nakertrans		15.1 M	

Biaya KPU (Membebani APBN dan APBD)



No	Alokasi Sumut	Jumlah
1	KPU Putaran I & 2	394 M + 109.3 M
2	Panwaslu	123 M
3	Desk Pilkada	1.8 M
4	Pengamanan	-
5	Pelantikan di DPRD	-

Biaya untuk KPU:

- KPU Nasional
- KPU seluruh Provinsi
- KPU seluruh Kabupaten dan Kota

Sumber KPU:

Biaya Pemilukada 2010 s/d 2014

(15 Trilyun)

Biaya Pemilu 2009:

49,7 Trilyun

Biaya Partai

- Tidak semua partai bisa ikut pemilu
- Ada syarat sulit, yakni:

Kepengurusan di:

33 propinsi,350an Kab/Kota dan2500an Kecamatan

Keanggotaan:

minimal 1000 orang di tiap cabang.



Kalau Tak Punya Milyaran Jangan Ngimpi Punya Partai



PetaPolitik.Com – Hanya satu partai baru yang lolos verifikasi Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, yaitu Partai Nasional Demokrat. Sisanya 13 partai baru yang mendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jika dibandingkan dengan partai-partai baru yang lain partai Nasdem memang menjulang.

Didukung oleh dua orang pengusaha media yang besar, Surya Paloh dan Hary Tanoe, didukung jaringan perusahaan dari Grup MNC plus jaringan berita MetroTV, maka tidak ada yang sebenarnya bisa menghalangi Partai

Nasdem untuk memenuhi syarat administrasi. Tahapan pertama kelengkapan kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kepengurusan wilayah Kabupaten/Kota, dan sekurangnya 50% Kecamatan di tiap Kabupaten/Kota.

- Selain sulit, syarat partai ikut pemilu itu butuh biaya sangat tinggi
- Karena Partai mendapatkan Privilege Politik dan pendiriannya berbiaya sangat tinggi,
 Partai malah menjadi lembaga transaksi bisnis politik, sehingga bergeser menjadi lembaga korporasi politik

Biaya Kandidat

Legislatif (2014)

- ▶ DPRD Kab- Kota
 - ▶ 100 500 jt
- DPRD Provinsi
 - ▶ 500 jt IM
- DPR Nasional
 - 2-6 Milyar



No	Alokasi
1	Biaya 'daftar' partai
2	Biaya relawan dan saksi
3	Biaya kampanye: iklan, spanduk dll
4	Biaya serangan fajar

Eksekutif

- Bupati-Walikota (2009)
 - ▶ 5 25 Milyar

Gubernur (2013)

▶ 100 - 250 Milyar

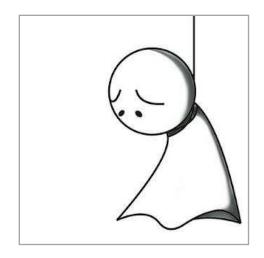
Presiden (2009)

> 1.5 Trilyun

Dampak Pemilu Biaya Mahal

Bagi yang Kalah

- Bayar Hutang
- Stress atau
- Bunuh Diri



Bagi yang Menang

- Bayar Hutang
- Balik Modal
- Ambil keuntungan (Korupsi)



Banyak Caleg Stress dan Bunuh Diri

- I. Caleg SK di Dapil I Kab Sumbawa menarik kembali bantuan sebuah mesin genset yang disumbangkannya ke mesjid.
- 2. Oknum caleg di Kota Sumbawa Besar, meminta kembali uang sebesar Rp 20 ribu per orang yang diberikan dengan target 50 hingga 60 suara.
- > 3. Caleg Partai Golkar dari Dapil I Dumai Timur mencabut kembali lima tiang listrik yang telah dipasang untuk menyalurkan listrik ke warga setempat.
- 4. Caleg dari PKB Kota Banjar, Jawa Barat, ditemukan tewas gantung diri sekitar pukul 07.30 WIB Selasa (14/4).
- ▶ 5. Caleg PDIP P.Sianipar ditemukan tewas di kediamannya, Senin (19/04) malam. Ia tewas bunuh diri akibat menenggak obat pembasmi serangga di dalam kamarnya di kediamannya Kec Medan Kota.
- 6.Tim Sukses (TS) Caleg pun bisa stres bahkan mengakhiri hidupnya. Itu dibuktikan MI(28), TS seorang Caleg yang kalah. Lelaki yang menetap Medan Johor ini nekat gantung diri di kediamannya, Jumat (10/4)

•

Banyak Caleg Stress dan Bunuh Diri

- ▶ 19. Di Kalteng muncul dua caleg dan tiga simpatisan partai yang mengalami tekanan psikis. Kelimanya kini dirawat di Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Kalawa Atei, Kalteng.
- 20. D, caleg DPRD Bulukumba dari PPRN. Caleg ini, melakukan aksi penyegelan gedung SDN 225 Kajang-Kajang, Desa Borong, Kecamatan
- ▶ 21. Caleg EP dari partai RepublikaN menggusur 42 KK dari lahan tempat mereka tinggal di kawasan Daeo, desa Gura, kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara (Halut).
- 22.TS caleg dari partai Golkar di Dapil I Ternate (Ternate Selatan-Moti) menarik televisi yang diberikan di pangkalan di Kelurahan Kayu Merah, termasuk merusak pangkalan tersebut hanya beberapa jam setelah penghitungan suara berakhir.

Berbagai Kerusuhan Pemilu Kada





- Banyaknya kerusuhan pilkada, a.l:
 - Sumbawa Barat
 - Flores Timur, NTT
 - Mojokerto, Jatim
 - Papua, 17 Tewas
 - Samosir, Sumut
 - Kab Karo, Sumut
 - Kota Sibolga, Sumut
 - Konawe Selatan, Sulteng
 - ▶ Tana Toraja, Sulsel
 - Soppeng, Sulsel
 - Gayo Alas, Aceh
 - dan banyak lagi

LAMPIRAN B

INSIDEN-INSIDEN KEKERASAN TERKAIT DENGAN PEMILU KADA TAHUN 2010100

1. April 2010, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 10 April, massa petahana bupati Zulkifli Muhadi dan lawannya Andi Azisi saling melempar batu setelah kelompok sang penantang mencoba menghalangi konvoi rivalnya. Pada tanggal 10 April, pendukung Andi berunjuk rasa mempermasalahkan keaslian ijazah sang petahana. Pada tanggal 24 April, mereka berbaku hantam dengan pendukung bupati yang ingin membagi-bagikan sembako ke calon pemilih sebelum pemungutan suara tanggal 26 April. Pada tanggal 28 April, ratusan demonstran bentrok dengan polisi ketika mereka menuntut KPUD untuk menghentikan proses rekapitulasi setelah berita kemenangan sang petahana mulai terhembus. Mereka terus meminta polisi untuk menyelidiki keabsahan ijazah Zulkifli. Ketika mereka hendak merangsek ke dalam kantor KPUD, polisi menahan mereka dengan hantaman tongkat dan tembakan peringatan serta gas air mata.

12 Mei, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Ribuan warga memblokir jalan menuju ibukota kabupaten di Larantuka sehinga anggota KPU pusat dan propinsi tak bias masuk kota. Mereka tadinya ingin mengumumkan kebijakan menganulir keputusan KPUD Kabupaten Flores Timur yang mendiskualifikasi pencalonan petahana Simon Hayon. Para demonstran menuntut agar proses pemilu diteruskan tanpa sang bupati dan merasa pihak pusat ingin mengintervensi politik tingkat lokal. Pada tanggal 14 Mei, pendukung-pendukung Simon memaksa KPUD untuk mengikuti keputusan KPU yang lebih tinggi dan polisi menemukan mereka membawa bom Molotov. Pada bulan Juli, KPU memberhentikan empat dari lima orang anggota dari KPUD yang menolak keputusan KPU itu. Pada tanggal 1 November, KPUD baru dibentuk dengan dengan mandat untuk melaksanakan pemilu pada tahun 2011.

3. 12 Mei, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Ratusan demonstran merusak kantor KPUD saat proses rekapitulasi setelah mendengar kabar bahwa petahana Imran menang besar pada pemilu tanggal 8 Mei. Mereka menuduh sang bupati telah menyalahgunakan jabatan dan membagi uang kepada pemilih. Pada bulan Juni, lawan politik Imran membawa kasus ke MK yang menutuskan perlu dilakukan pemilihan ulang namun Imran tidak didiskualifikasi. Dalam pemilihan ulang 11 Juli, sang petahana malahan mendapatkan suara yang lebih banyak dan ini memicu protes yang lebih besar pada tanggal 19 Juli yang berakhir dengan bentrok antar pendukung.

15 Mei, Kota Sibolga, Sumatra Utara

Empat kantor kecamatan yang menyimpan kotak-kotak suara dibakar dua hari setelah pemungutan suara tanggal 13 Mei yang diwarnai pertarungan antara wakil bupati Afifi Lubis dan mantan anggota DPR. Syarfi Hutauruk yang berpasangan dengan menantu bupati yang tak dapat maju lagi. Pendukung Afifi menuduh sang bupati memakai jabatannya untuk menghalangi-halangi pencalonan wakilnya itu namun protes ini hanya terdengar setelah quick count meramalkan Syarfi unggul.

16. 25 Juni, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan

Para pengunjuk rasa membakar dua kantor kecamatan dan sebuah gedung yang di dalamnya ada kantor KPUD setelah quick count meramalkan kemenangan untuk bupati petahana Andi Soetomo. Insiden-insiden ini menunda proses penghitungan suara untuk beberapa hari. Penantang terdekatnya, Andi Kaswadi Razak yang menjabat ketua DPRD, mencoba menyulitkan proses administrasi KPUD mengakibatkan tertundanya pelantikan bupati terpilih sampai dengan 16 Oktober.

17. 20 Juli, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku

Pendukung bupati Abdullah Vanath dan lawannya Mukti Keliobas yang menjabat ketua DPRD berbaku hantam di jalanan setelah sang petahana menang mutlak pada pemungutan suara 7 Juli. KPUD menolak permintaan sang penantang untuk penghitungan ulang di pulau terpencil Gorom dimana penyelenggara pemilu ditenggarai telah menggelembungkan suara. Namun, Mukti melapor ke KPU propinsi yang akhirnya memerintahkan KPUD untuk memenuhi tuntutan itu. Ketika KPUD memutuskan untuk tak menggubrisnya, pendukung Mukti menyerang markas lawan dan membakar kantor-kantor pemerintahan. Pada bulan Agustus, MK menolak tuntutan penghitungan ulang itu dan memastikan kemenangan Vanath.

18. 23-24 September, Kotawaringin Barat district, Central Kalimantan

Pendukung Sugianto Sabran mengannuk setelah keluarnya Keputusan MK untuk menganulir kemenangan calonnya dalam pemungutan suara 5 Juni karena MK menganggap terjadi usaha pembelian suara yang massif MK dalam putusannya juga menetapkan bupati petahana Ujang Iskandar sebagai pemenang dan langkah ini memicu tuduhan suatu konspirasi dari Jakarta untuk menggagalkan gerakan pro-perubahan di daerah itu KPUD menolak untuk mengeksekusi keputusan tertanggal 7 Juli itu di tengah meningkatnya ketegangan di daerah itu dan ini membuat KPU Pusat untuk member peringatan kepada KPUD pada tanggal 22 September. Keputusan kedua yang berasal dari Jakarta ini memperkuat persepsi bahwa kekuatan pusat sedang mengintervensi urusan daerah dan memicu pembakaran monumen Adipura yang berada di ibukota kabupaten. Lembaga-lembaga setempat menolak melaksanankan keputusan MK itu karena takut menjadi target dari kemarahan kelompok Sugianto sehingga daerah itu dipimpin seorang penjabat sementara sampai sekarang yang tak memiliki hak menentukan anggaran. Pejabat di daerah telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan keputusan MK namun ia masih enggan. Inilah satu-satunya kasus kekerasan yang diakibatkan putusan MK pada tahun 2010.

19. 24 October, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Sebuah bom meledak di kantor KPUD tengah malam, beberapa jam setelah polisi mendorong mundur demonstran yang menggugat kemenangan bupati petahana Ferry Zulkarnain secara sporadis. Salah satu anggota tim sukses dari sang bupati divonis telah melakukan pembelian suara lima hari sebelum pelantikan tanggal 9 Agustus. Pengadilan memutuskan Ferry tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

20. 1 November, Kabupaten Karo, Sumatra Utara

Ratusan orang membakar ban di jalan dan melempar batu ke arah hotel dimana KPUD sedang melakukan rekapitulasi setelah pemungutan suara tanggal 27 Oktober. Para demonstran itu menuntut pemilu ulang dan menuduh kedua calon yang mendapatkan suara terbanyak telah melakukan pembelian suara. Polisi melontarkan gas air mata dan menggunakan tongkat untuk membubarkan massa. Pada tanggal 6 November, sebuah gedung pemerintahan dibakar di tengah malam. Sengketa ini telah dibawa ke MK sehingga putaran kedua menjadi tertunda.

Perilaku Pejabat Hasil Pemilu dan Pilkada

Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) Tersangka Korupsi (Hingga Febr 2014) Jumlah % Dari 311 524 60



Izin Pemeriksaan Anggota DPRD (2013)		
DPRD Propinsi	431	orang
DPRD Kab - Kota	2545	orang
Total	2976	orang

Untuk DPRD, izin pemeriksaan terkait berbagai kasus a.l:

korupsi,

penipuan,

penganiayaan,

perzinahan,

perjudian,

hingga pembunuhan

94%

Pasangan Pejabat Pecah Kongsi

Data Kemendagri: 94% Pasangan Kepala Daerah Pecah Kongsi

Luhur Hertanto - detikNews

- Dari 244 Pilkada 2010 dan 67 Pilkada 2011, Kemendagri mencatat terdapat 94% Pasangan Kandidiat Pecah Kongsi
- Tidak sedikit terjadi dimana si wakil bos malah melaporkan kesalahan atasannya ke kepolisian, berharap si bos dijadikan tersangka dan ia 'naik kelas' menjadi bos pengganti.

Fauzi Bowo dan Priyanto Akhirnya Pecah Kongsi

26 December 2011 | 12:05 am | Dilihat : 626



Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mayjen TNI (Pur) Prijanto secara mendadak mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri Prijanto sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, telah resmi diajukan tertanggal 23 Desember 2011. Di dalam surat tersebut tidak disebutkan alasan jelas pengunduran diri, seperti rencananya maju sebagai Cagub DKI Jakarta. Kepala Bidang Informasi Publik DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia dalam rilisnya Minggu (25/12/2011) menyebutkan, "Fauzi Bowo telah mendapat kabar resmi menyangkut pengunduran diri Waqub DKI Prijanto."

No	Pasangan Pecah Kongsi
1	Syamsul Arifin – Gatot (Sumut)
2	Abdillah – Maulana Pohan (Medan)
3	Abdillah – Ramli (Medan)
4	Ahmad Heriyawan - Dede Yusuf (Jabar)
5	Aceng Fikri - Dicky Chandra (Garut)

Pemilu yang **SULIT** Dilaksanakan

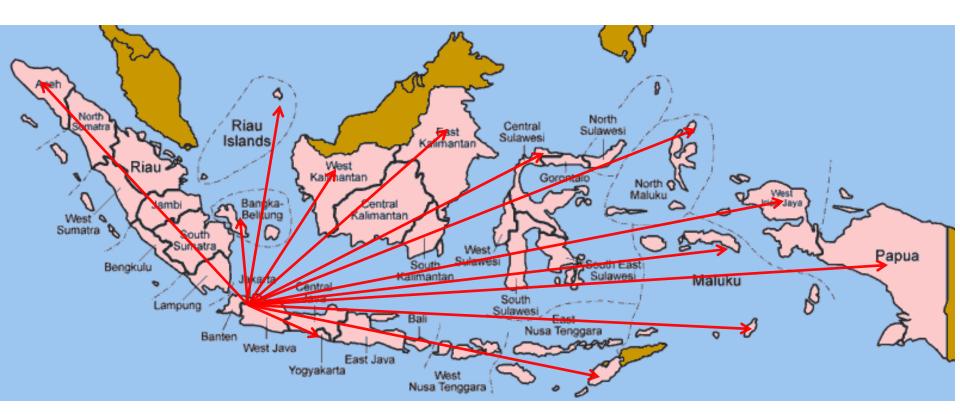
Pemilu yang **SULIT** Dilaksanakan





SULIT untuk Verifikasi DPT

Karena terlalu banyak dinamika data yang harus diperika.



SULIT untuk distribusi logistik ke seluruh pelosok tanah air negara kepulauan Indonesia





Distribusi logistik ke seluruh wilayah di pegunungan, pedalaman hingga penghujung kepulauan NUSANTARA

Monday, August 1st, 2011 | Posted by redaksi

Kerusuhan Pilkada Papua, 17 Orang Tewas



Puncak-JP: Kerusuhan pecah antar kelompok massa kelompok Elvis Tabuni dan Simon Alom yang diduga akibat sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Puncak, Papua, mengakibatkan 17 orang tewas. Kabid Humas Polda Papua mengungkapkan, kerusuhan itu terjadi antara kelompok masa pendukung bupati.

Elvis Tabuni dan Simon Alom mencalonkan diri menjadi

bupati setempat dalam pilkada yang digelar bulan ini. Massa dari kelompok Simon Alom membakar rumah Elvis Tabuni pada pukul 06.00 WIT. Sekitar satu jam kemudian, kedua kelompok massa mulai bentrok. "Situasi kerusuhan cukup panjang, dari gedung DPRD hingga rumah Elvis Tabuni,".

Sebanyak 13 orang dari pihak Elvis tewas dengan luka-luka cukup parah. Sisanya, empat orang yang tergabung dalam kelompok Simon tewas seketika. Kerusuhan juga mengakibatkan puluhan orang luka-luka. Kedua kelompok warga saling serang dengan menggunakan batu dan panah.

SULIT untuk verifikasi kecurangan pemilu

Karena data yang harus diperiksa terlalu banyak.

Video Foto Kerusuhan Pilkada Mojokerto | Massa Bakar 16 Mobil PEMKAB



Video Foto Kerusuhan Pilkada Mojokerto |
Pembakaran Mobil DPRD Mojokerto Kerusuhan kembali terjadi di ranah negeri
ini, setelah Kerusuhan Priok, kali ini berita
mengenai Kerusuhan Pilkada Mojokerto
tengah hangat diperbincangkan. Massa yg
anarkis, membakar belasan mobil anggota
DPRD dan PEMBKAB Mojokerto pada Jumat
21 Mei 2010. Kerusuhan yg mewarnai rapat
pleno penyampaian misi dan visi calon

bupati Mojokerto tersebut mengakibatkan Bentrok antara Massa dan Polisi, Puluhan

0 komentar

massa yg tergabung dalam Aliansi Rakyat Kabupaten Mojokerto (Arkam) mengepung dan menjebol pagar gedung DPRD setempat, massa juga membawa BOM Molotov dan melemparkannya kearah gedung dewan. *Kerusuhan Pilkada Mojokerto* itu pun merembet ke gedung Pemerintahan Kabupaten yang terletak di samping gedung dewan.

SULIT untuk penyelesaian konflik pasca pemilu

Pilpres dan Pilkada Penyebab Birokrasi Terpolarisasi

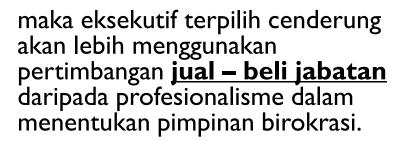
- Pimpinan eksekutif dipilih lewat PERSAINGAN TERBUKA (Pemilu) yang BERBIAYA BESAR.
- Karena pemilihan eksekutif melalui persaingan terbuka (pemilu)
- maka orang-orang birokrasi yang ingin menjadi pejabat (Eselon I hingga)
 IV) melakukan pendekatan ke kandidat A ataupun kandidat B, sehingga terbentuk kubu-kubuan)



- Kalau di Pusat, yang ingin jadi Dirjen merapat ke kandidat Presiden
- Kalau di daerah, yang ingin jadi Kepala Dinas, merapat ke kandidat Walikota/Bupati/Gubernur
- Selanjutnya, yang ingin jadi Kepala Bidang, merapat ke yang ingin jadi Kepala Dinas tadi
- Selanjutnya lagi, yang pengen jadi Kepala
 Seksi merapat ke yang pengen jadi Kepala
 Bidang tadi
- Akhirnya, jajaran birokrasi di pusat daerah menjadi berkubu-kubu atau terpolarisasi

Pilpres dan Pilkada Penyebab Birokrasi Tidak Profesional

 Karena pemilihan eksekutif melalui pemilu yang BERBIAYA BESAR



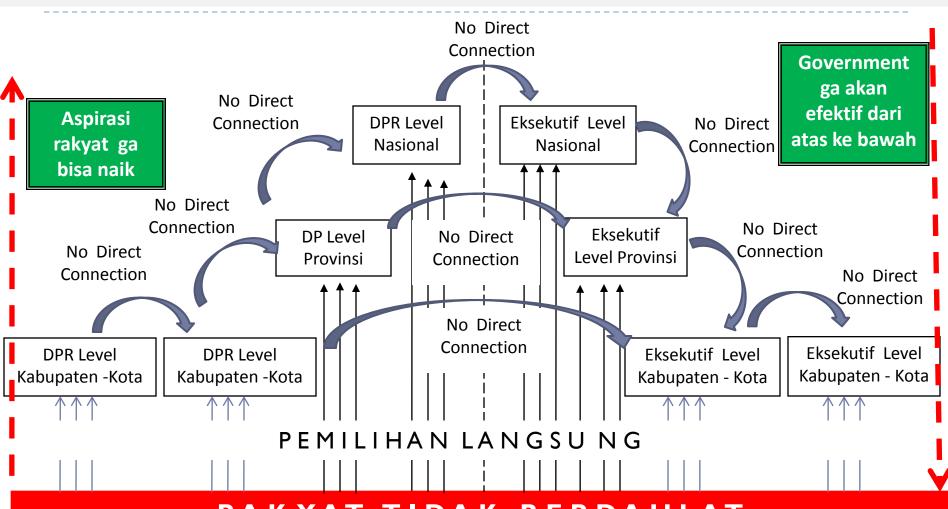
 Selanjutnya, pimpinan birokrasi, karena sudah terlanjur keluar dana untuk mendapatkan jabatan, juga cenderung akan menggunakan pertimbangan jual beli jabatan untuk menentukan pejabat di bawahnya (eselon II – IV) daripada pertimbangan kecakapan.



- Pihak ketiga (kontraktor, konsultan serta pengadaan) cenderung akan menjadi sponsor untuk transaksi jual-beli jabatan tersebut.
- Akhirnya, kualitas program/kegiatan yang dilaksanakan pihak ketiga tidak akan berkualitas karena sudah ada potongan dana sponsor tadi.

Pemilu LANGSUNG Saat Ini =

Tidak Ada **Ikatan** antar Lembaga Negara = STRATEGI **DEVIDE ET IMPERA** ANTAR WILAYAH NKRI



RAKYAT TIDAK BERDAULAT

(Tidak Bisa Pecat Wakil Rakyat)

Kebutuhan Mencari Pemilu Alternatif

Kebutuhan Mencari Pemilu Alternatif

Mahfud MD: Semua Pilkada Pasti Diwarnai Kecurangan

Rabu, 25 Januari 2012 11:35 WIB



Jakarta, (tvOne)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang selama ini dilaksanakan tidak ada yang bersih dari pelanggaran. "Semua Pilkada pasti diwarnai kecurangan, yang sah sekalipun pasti ada curangnya," kata Mahfud, saat berpidato dalam seminar Evaluasi Pilkada yang diselenggarakan MK di Jakarta, Rabu.

Prof Mahfud MD:

"...., kita

perlu mencari

berbagai

ALTERNATIF terkait

pelaksanaan Pilkada

mendatang"

Pada Seminar Nasional MK: "Evaluasi Praktek Pilkada",Januari 2012

Minggu, 16/09/2012 17:55 WIB

PBNU Rekomendasikan Sistem Pemilihan Kembali ke Pilkada Tak Langsung

M Rizki Maulana - detikNews





PEMILU ala BUNG HATTA: PENDAHULUAN

Pemilu 1955

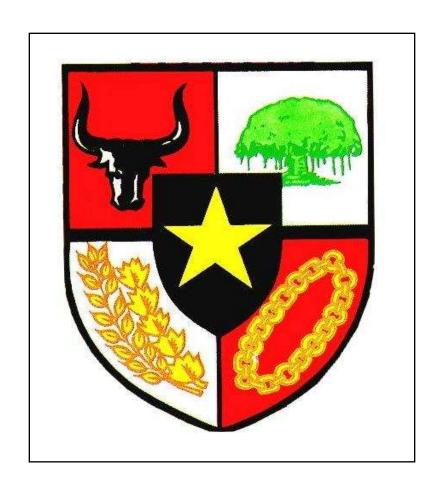
- Sistem Pemilu 2004, 2009, dan 2014 mirip dengan Pemilu 1955 yang multi partai
- ▶ Pemilu 1955 diikuti oleh 29 partai
- Bung Hatta mengundurkan diri pada I Desember 1956 dari posisi wakil presiden.
 Salah satu sebab utamanya adalah perilaku elit partai politik pada saat itu yang korup dan lebih mengutamakan kepentingan partai
- Suasana tidak stabil di masa pemilu 1955 (sistem parlementer),
- juga menyebabkan PM Ali Sastro mengundurkan diri tepat di hari pemungutan suara. 34







Ingatkah anda bahwa:



- Sila ke 4 Pancasila, menyatakan:
- "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
 - PERMUSYAWARATAN dan
 - PERWAKILAN"

Bung Hatta menyatakan:

- Demokrasi BARAT berdasarkan kepada Individualisme.
- ▶ Demokrasi KITA berdasarkan kepada Kolektivisme.
 - Sifat pertamanya, mengambil keputusan dengan MUSYAWARAH MUFAKAT, merupakan DASAR untuk DEMOKRASI POLITIK.
 - Sifat keduanya, TOLONG MENOLONG dan GOTONG ROYONG, merupakan dasar untuk DEMOKRASI EKONOMI.
- dari tulisan Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat

DEMOKRASI ASLI INDONESIA DAN KEDAULATAN RAKYAT (Mohammad Hatta)

By Sejarawan Muda on 23 Juni 2011



Bung Hatta menyatakan:

- Demokrasi Asli Indonesia itu adanya di Desa-Demokrasi
- Akan tetapi di atas dasar "demokrasi asli" itu kaum ningrat yang kolot nanti dapat mempertahankan peraturan feodalisme (sifat perbudakan) bagi Indonesia, dengan mengambil contoh kepada Indonesia lama (zaman kerajaan).
- Demokrasi asli harus diluaskan dan dilanjutkan, yakni ke cara-cara perwakilan dengan perantaraan rapat-rapat dan dewandewan berjonjong (bersusun-susun) dari bawah ke atas, dari yang sekecil-kecilnya di desa sampai kepada yang sebesar-besarnya, Dewan Rakyat Indonesia.
- Demikianlah Dasar Demokrasi Indonesia menurut dasar Kedaulatan Rakyat

Bung Hatta menyatakan:

- Sebab itu segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya.
- BADAN BADAN PERWAKILAN dibangun mulai dari level DESA, kemudian ke kecamatan, kabupatan-kota, keresidenan hingga NASIONAL.
- dari tulisan Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat

DEMOKRASI ASLI INDONESIA DAN KEDAULATAN RAKYAT (Mohammad Hatta)

By Sejarawan Muda on 23 Juni 2011



BAGAIMANA PROSES PEMILU ALA BUNG HATTA

Pemilu Alternatif

Perwakilan Level Kecamatan

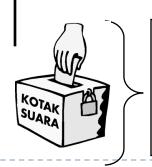
Musyawarah-Mufakat-untuk pilih wakil (di antara mereka) ke Kabupaten - Kota

Musyawarah Mufakat untuk pilih wakil (di antara mereka) ke Kecamatan

Perwakilan Level Desa – Kelurahan/ Nagari/Pasirah

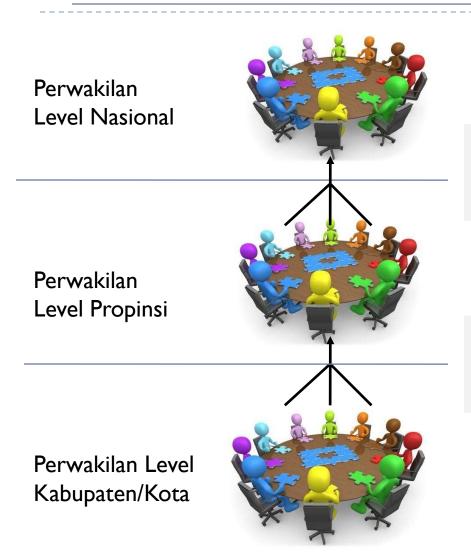
Musyawarah atau Pemilu Langsung di Level RW/Dusun/Kampung





Warga memilih seseorang di **RW/Dusun/Kampung** untuk menjadi perwakilan di level Desa/Kelurahan

Pemilu Alternatif (Cont...)



Musyawarah – Mufakat Menunjuk Wakil (diantara mereka) ke Level Nasional

Musyawarah – Mufakat Menunjuk Wakil (diantara mereka) ke Level Provinsi

Apa ciri Pemilu Alternatif ala Bung Hatta

- Secara Bertingkat Dimulai dari DESA KELURAHAN
- ▶ Kental dengan MUSYAWARAH MUFAKAT
- ▶ Tidak Wajib Partai
- KPU-nya dibentuk oleh dan berada di tiap Desa Kelurahan
- ▶ Biaya Pemilu ditanggung oleh masyarakat
- Cara pemilihan perwakilan diatur oleh masing masing Desa – Kelurahan sesuai kesepakatan dan nilai-nilai asli setempat.



Apa Manfaat Pemilu Alternatif ala Bung Hatta

- Pemilu yang Murah
- Mudah dilaksanakan
- Lebih Demokratis
- Menghasilkan Saringan Wakil Rakyat Terpercaya (Amanah)
- ▶ Terhindar dari 'Devide et Impera' pada NKRI
- ▶ Terhindar dari Polarisasi Birokrasi
- Memberi Kesempatan Munculnya Budaya Asli Indonesia dalam Pemilihan Pemimpin



Mengapa pemilu berbasis di level **Desa-Kelurahan**?

Karena:

Ruang DESA - KELURAHAN cukup kecil

sehingga sesama WARGA

LEBIH SALING MENGENAL

- Sehingga
- Rakyat dapat lebih mudah untuk: mengetahui, menelusuri dan memverifikasi secara langsung/tidak langsung siapa orang-orang yang terpercaya atau tidak.



Karena

Rakyat akan lebih mudah menjangkau

(mempengaruhi atau bahkan memecat) wakil rakyatnya di (dan melalui) Desa – Kelurahan masing-masing.

••

Apa Maksud Pemilu **Tidak Wajib Partai?**



- Bukan berarti tidak boleh ada partai
- Bahkan partai lokal maupun regional boleh dibentuk
- Siapapun,
 baik pribadi maupun dengan lembaga,
 pake partai ataupun tidak,
 boleh ikut bertanding menjadi kandidat
- Yang penting, semua kandidat harus bertanding melalui DESA KELURAHAN masing-masing.

Apa Maksud Pemilu **Murah**?

- Tidak perlu biaya kampanye besar, karena WILAYAH KAMPANYE hanya seluas DESA - KELURAHAN
- Tidak perlu BIAYA DAFTAR PARTAI



Tidak perlu Biaya KPU di APBN/APBD, karena 'KPU' dibentuk, berada, dan dibiayai oleh masyarakat di masing2 Desa-Kelurahan.

Tidak perlu biaya mahal untuk memilih perwakilan maupun eksekutif cukup dengan musyawarah perwakilan.

Tidak perlu biaya mahal untuk MENCOPOT (dan MENGGANTI) legislatif maupun eksekutif, cukup dengan musyawarah perwakilan.

Pemilihan Pemimpin, yang **Mudah**

Mudah karena
PEMILU LANGSUNG hanya di level DESA –
KELURAHAN



Musyawarah – Mufakat

- Mudah karena
 untuk memilih perwakilan KECAMATAN
 hingga NASIONAL
 cukup dengan musyawarah perwakilan saja
- Mudah karena untuk memilih eksekutif cukup dengan musyawarah perwakilan saja
 - Mudah karena
 untuk MENCOPOT dan MENGGANTI
 legislatif maupun eksekutif
 cukup dengan MUSYAWARAH DEWAN
 PERWAKILAN
 YANG MEMILIHNYA.

Mengapa Pemilu di Desa - Kelurahan Lebih Mudah?

Monday, August 1st, 2011 | Posted by redaksi

Kerusuhan Pilkada Papua, 17 Orang Tewas



Puncak-JP : Kerusuhan pecah antar kelompok massa kelompok Elvis Tabuni dan Simon Alom yang diduga akibat sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Puncak mengakibatkan 17 orang tewas. Kabid Humas Polda Papua mengungkapkan, kerusuhan itu terjadi antara kelompok masa pendukung bupati.

Elvis Tabuni dan Simon Alom mencalonkan diri menjadi

bupati setempat dalam pilkada yang digelar bulan ini. Massa dari kelompok Simon Alom membakar rumah Elvis Tabuni pada pukul 06.00 WIT. Sekitar satu jam kemudian, kedua kelompok massa mulai bentrok. "Situasi kerusuhan cukup panjang, dari gedung DPRD hingga rumah Elvis Tabuni,".

Sebanyak 13 orang dari pihak Elvis tewas dengan luka-luka cukup parah. Sisanya, empat orang yang tergabung dalam kelompok Simon tewas seketika. Kerusuhan juga mengakibatkan puluhan orang luka-luka. Kedua kelompok warga saling serang dengan menggunakan batu dan panah.

Rusuh karena SULIT untuk verifikasi kecurangan pemilu

- MUDAH (dan MURAH) untuk:
 - Distribusi logistik pemilu (kertas, tinta dan kotak suara)
 - Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT),
 - Verifikasi kecurangan pemilu maupun
 - Penyelesaian konflik pasca pemilu.

Maksud Sistem

Lebih Demokratis?

Dewan Perwakilan di level bawah bisa mencopot/mengganti anggota dewan di level atas yang mereka pilih/utus.



Dewan paling bawah yang paling berkuasa.

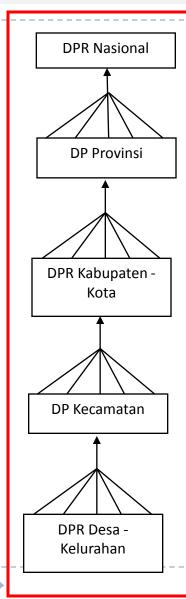
- Rakyat bisa **menjangkau** / **memecat** Wakil Rakyat di Desa Kelurahan masing2.
- Rakyat memiliki saluran memperjuangkan kepentingan
 melalui rantai wakil rakyat dari Desa -Kelurahan hingga Nasional

- Demokratis = Rakyat Berkuasa
- Sehingga rakyat banyak
- (melalui Desa Kelurahan masing2)
- akan memiliki jangkauan yang LEBIH KUAT

atas keputusan publik

daripada Pemilik Modal Besar.

Saringan Berlapis Hasilkan Wakil Rakyat Terpercaya



- Memilih wakil rakyat di DESA -KELURAHAN akan mendapatkan figur-figur DIKENAL dan TERPERCAYA
- Selanjutnya
 mereka memilih perwakilan TERPERCAYA
 (di antara mereka)
 sebagai utusan ke level kecamatan,

begitu seterusnya hingga level nasional.

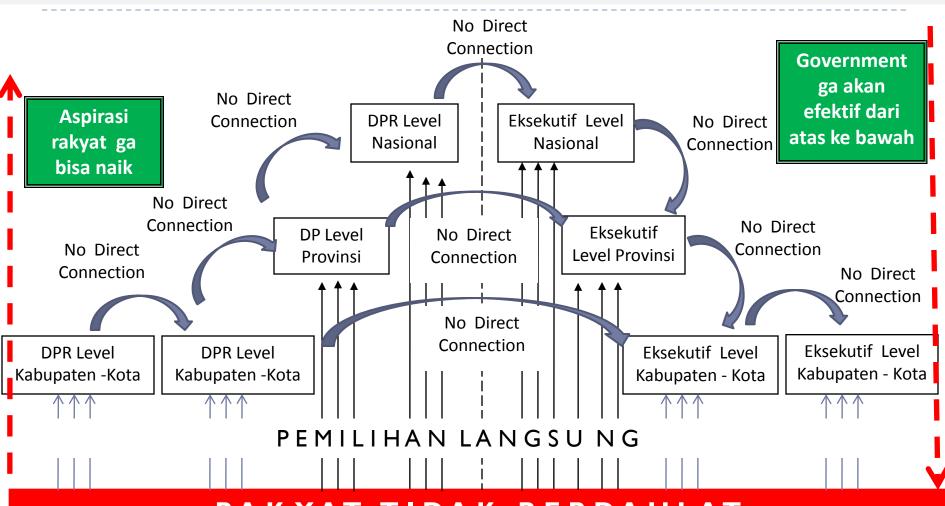
Pada akhirnya sistem ini
secara BERLAPIS akan MENYARING
sekumpulan orang wakil rakyat
PALING TERPERCAYA (wakil rakyat nasional)

Sistem Pemilihan yang dapat mencegah Devide et Impera pada NKRI

Pemilu Saat Ini: Penyebab *Devide et Impera*

Pemilu LANGSUNG Saat Ini =

Tidak Ada **Ikatan** antar Lembaga Negara = STRATEGI **DEVIDE ET IMPERA** ANTAR WILAYAH NKRI



RAKYAT TIDAK BERDAULAT

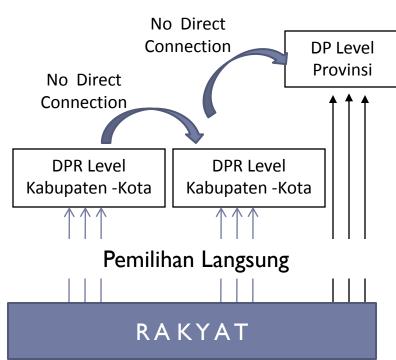
(Tidak Bisa Pecat Wakil Rakyat)

Pemilu Langsung = Tidak ada ikatan antar Lembaga

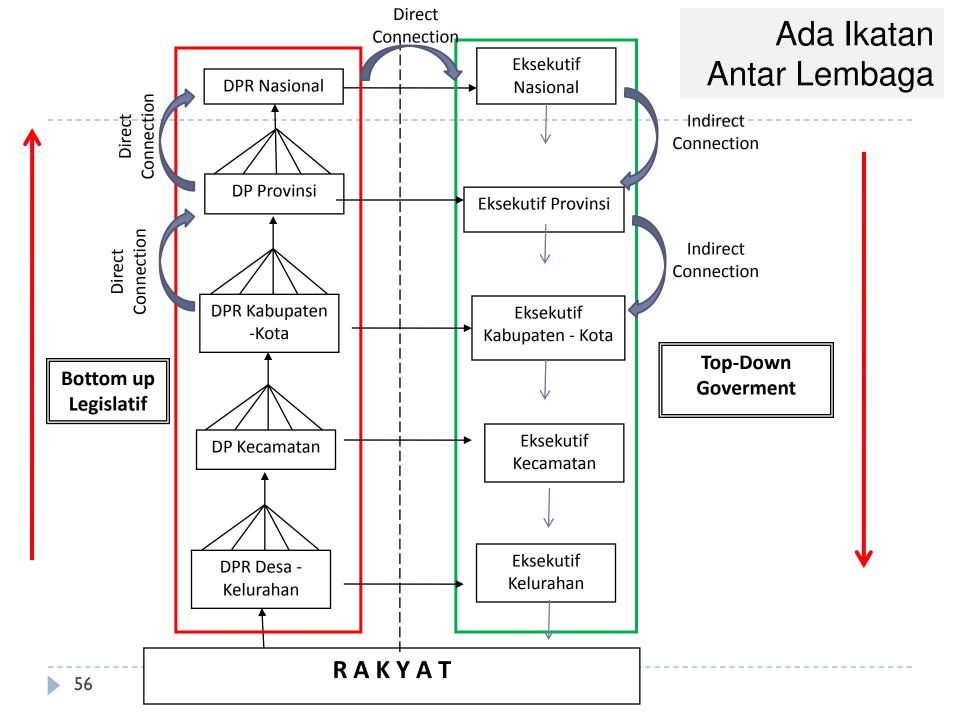
Karena semua pemilihan dengan 'Pemilihan Langsung', maka tidak terjadi ikatan (no connection) antar lembaga negara,
No Direct

yakni:

- antara legislatif se level,
- antara legislatif antar level,
- antara legislatif dengan eksekutif,
- antara eksekutif se level, maupun
- antara eksekutif antar level.



Bandingkan dengan Pemilu Bung Hatta:



Sistem Pemilu Demokratis Berbiaya MURAH Ala Bung Hatta:

Menjalankan Musyawarah Perwakilan (Pancasila sila ke-4) Secara Bertingkat. Memastikan 'Yang Dipilih" adalah "Yang Dikenal dan Dipercaya".



Perwakilan dapat berasal dari Partai Nasional, Partai Regional, Partai, Lokal, Ormas, LSM, maupun Individual.

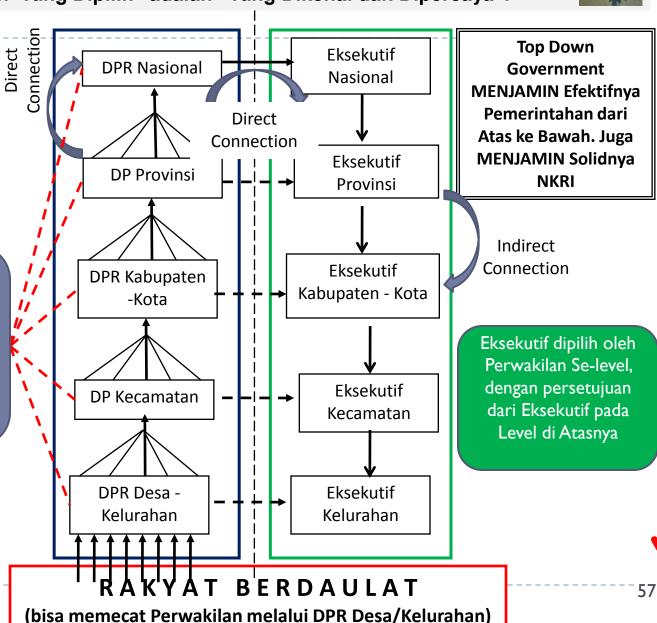
Semua harus dimulai dari Desa/ Kelurahan masing2

Perwakilan di Level Atas diutus oleh Perwakilan dari Level Bawahnya.

Perwakilan di Level Bawah dapat memecat Perwakilan di Level Atasnya

Perwakilan Bertingkat MENJAMIN Saluran Aspirasi Naik dari Bawah Ke Atas.

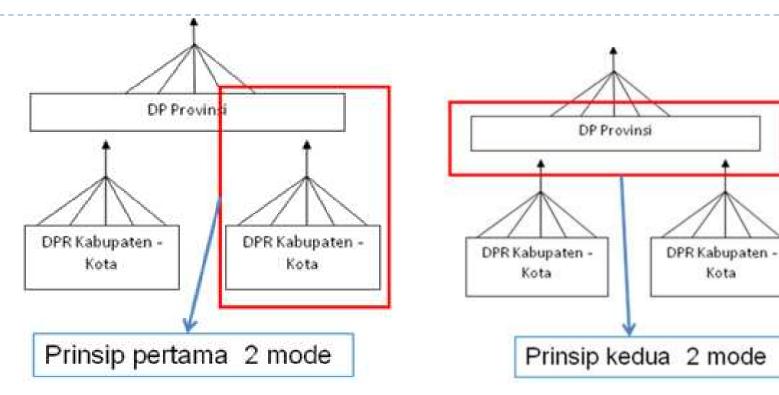
Sehingga tidak akan diperlukan lagi aksi Pemekaran Wilayah



Adanya Ikatan Antar Lembaga Antar Wilayah membuat hubungan yang kuat antar kelembagaan negara

Menelaah Adanya **Ikatan** Antar Lembaga, menggunakan konsep 2 mode network dari Social Network Analysis

Adanya Ikatan antar Lembaga Legislatif



Ada ikatan antara legislatif antar level

Ada ikatan antara legislatif se-level

Kota

Cara Memilih Pemimpin yang Khas Budaya Indonesia

- Agar masyarakat DESA-KELURAHAN, terutama di PEDALAMAN, tidak menggunakan cara pemilihan yang ASING dan DIPAKSAKAN dari luar konteks pengertian mereka.
- Agar memberi kesempatan budaya dan nilai-nilai asli setempat untuk digunakan dalam pemilihan pemimpin.



Cara pemilihan pemimpin yang **BELUM TENTU** sesuai dengan budaya asli setempat

Cara Memilih Pemimpin yang Khas Budaya Indonesia



Cara pemilihan pemimpin yang **BELUM TENTU** sesuai dengan budaya asli setempat

- Dengan mengaktifkan 1.128 suku di 79.075 desa/kelurahan, dengan berbagai adat dan cara pemilihan pemimpinnya, yang khas,
- akan berdampak pada
 budaya dan nilai asli setempat
 terlibat dalam
 perkembangan dan cara
 demokratisasi yang khas
 Indonesia.

Machfud: Pilkada Papua Sebaiknya Mengikuti Pola Kepala Suku

Usulan Bpk Machmud ini karena merespon banyaknya kerusuhan terkait Pilkada, dan terutama terkait beberapa kerusuhan Pilkada di Papua.







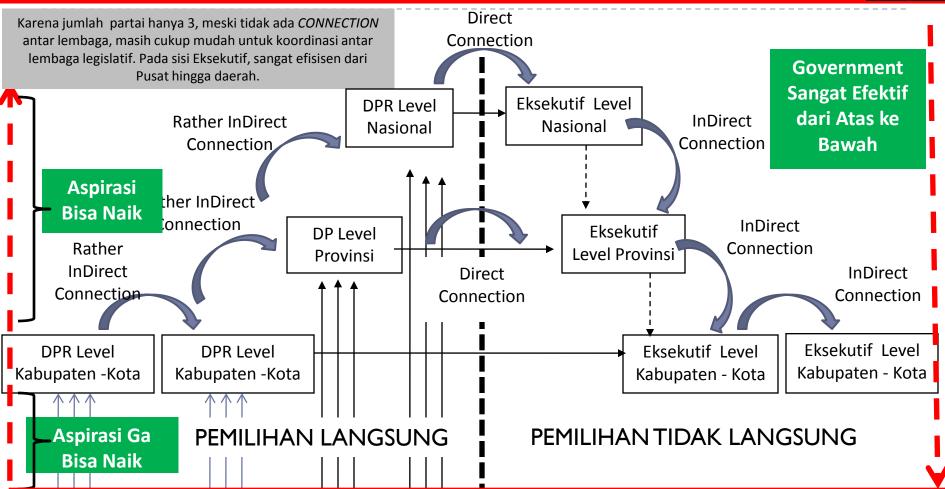
Perbandingan Pola Pemilu, Antara Ala Soeharto, Ala SBY, dan Ala Bung Hatta

Pemilu Era Soeharto =

Aspirasi Tidak Demokratis, Eksekutif sangat Efektif =



TIDAK PECAH BELAH ANTAR WILAYAH NKRI

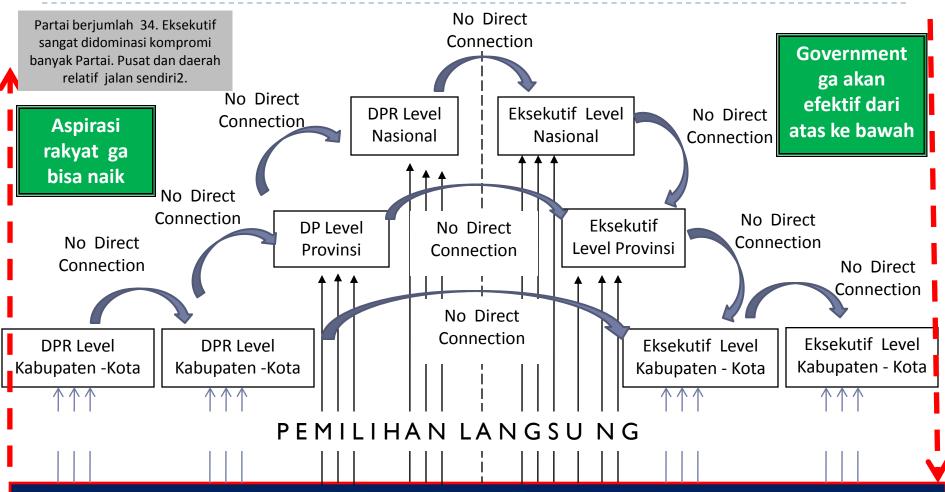


RAKYAT TIDAK BERDAULAT

(Setelah Pemilihan, Rakyat Tidak Bisa Pecat Wakil Rakyat)

Tidak Ada **Ikatan** antar Lembaga Negara = STRATEGI **DEVIDE ET IMPERA** ANTAR WILAYAH NKRI





RAKYAT TIDAK BERDAULAT (Setelah Pemilihan, Rakyat Tidak Bisa Pecat Wakil Rakyat)

Sistem Pemilu Demokratis Berbiaya MURAH Ala BUNG HATTA:

Menjalankan Musyawarah Perwakilan (Pancasila sila ke-4) Secara Bertingkat. Memastikan 'Yang Dipilih" adalah "Yang Dikenal dan Dipercaya". Ada Ikatan Antar Lembaga, Lebih Menjamin Kokohnya NKRI



Perwakilan dapat berasal dari Partai Nasional, Partai Regional, Partai, Lokal, Ormas, LSM, maupun Individual.

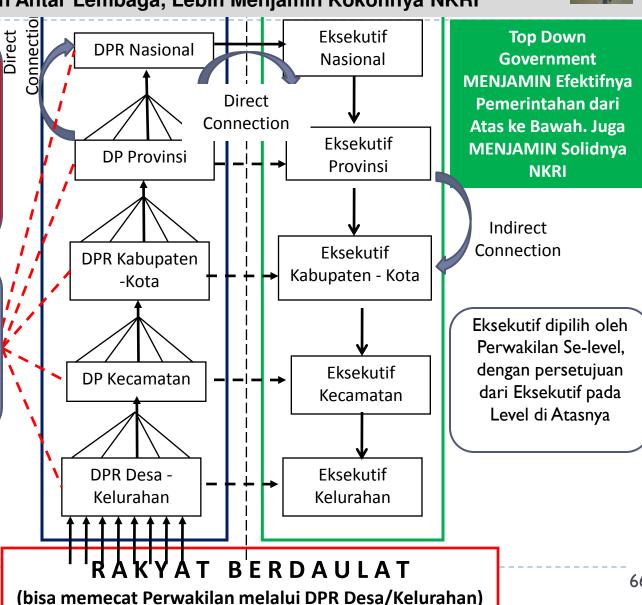
Semua perwakilan harus dimulai dari Desa/ Kelurahan masing2

Perwakilan di Level Atas diutus oleh Perwakilan dari Level Bawahnya.

Perwakilan di Level Bawah dapat memecat Perwakilan di Level Atasnya

Perwakilan Bertingkat MENJAMIN Saluran Aspirasi Naik dari Bawah Ke Atas.

> Sehingga tidak akan diperlukan lagi aksi Pemekaran Wilayah



Pemilihan Berbasis Desa/Kelurahan VS Berbasis Kab/Kota Ataupun Nasional

Berbasis Desa/Kelurahan

- Ruang Kampanye Kecil
- 2. Pemimpin rakyat dikenal rakyat, Pemimpin tidak terlalu perlu memperkenalkan diri
- Pemimpin Jujur akan lebih mudah tampil, karena tidak butuh biaya tinggi untuk dikenal
- 4. Biaya memperkenalkan diri sangat rendah, karena luas wilayah kampanye sangat kecil
- 5. Rakyat akan lebih mudah memverifikasi kualitas calon.
- 6. Media komunikasi alamiah setempat (pengajian warga, pertemuan olah raga, perbincangan warga di warung) menjadi tempat untuk verifikasi calon yang mudah dan sangat efektif.
- 7. Tidak perlu banyak poster bertebaran
- 8. Cara Pemilihan Pemilihan Bisa sangat beragam sesuai Adat-Istiadat dan Nilai berbagai suku di Desa/ Kelurahan/Pasirah/Nagari Setempat

Berbasis Kab/Kota, Propinsi, atau Nasional

- I. Ruang Kampanye Sangat Luas
- 2. Calon pemimpin tidak dikenal rakyat
- 3. Calon Pemimpin Butuh Memperkenalkan diri, sehingga butuh biaya kampanye dan Pencitraan
- 4. Hanya yang Bermodal (atau Dimodali) yang bisa menjadi pemimpin
- 5. Pemimpin rakyat yang jujur akan sulit muncul karena butuh biaya sangat tinggi untuk dikenal dan mencukupi syarat pemilihan
- Rakyat tidak mampu memverifikasi kejujuran calon, karena yang tampil hanya citra yang dibangun.
- Poster bertebaran di pinggir jalan merusak estetika kota/desa
- 8. Cara Pemilihan Dihomogenkan dan mematikan adat istiadat dan nilai dari banyak suku



Pemilu Saat ini Vs Pemilu Alternatif

	Cara Pemilihan			Biaya Pemilu				
	Eksistensi	Legislatif	Eksekutif	Kertas Suara	Kotak Suara	Gaji KPU	Biaya	Biaya Kandidat
	Partai						Partai	
Pemilu	Hanya partai	Pemilu	Dipilih lewat	Sangat	Sangat	Gaji dan	Perlu biaya	Biaya 'perahu'
Lama	yang berhak di	langsung level	pemilu	banyak butuh	banyak butuh	operasional KPU	yang	dan biaya
	DPR/DPRD.	Kabupaten,	langsung. Bisa	kertas suara.	Kotak suara.	Pusat, KPU	sangat	kampanye.
	Hanya partai	Propinsi dan	calon	Biayanya	Biayanya	propinsi dan KPU	tinggi	Kampanye
	yang berhak	Nasional.	independen.	mahal sekali	mahal sekali	Kabupaten	untuk	harus seluas 1
	menjadi Calon	Memilih oleh	Memilih orang	selain	selain	selama 5 tahun	membuat	kabupaten,
	Presiden	yang belum	yang belum	pengadaan,	pengadaan,	dengan	partai	kampanye 1
		tentu dikenal.	tentu dikenal	juga distribusi	juga distribusi	bersumber APBD/		propinsi,
			karena jauh >3	se-Indonesia.	se-indonesia.	APBN		kampanye
			degrees.					nasional. Biaya
								sangat besar.
Pemilu	Tidak wajib	Pemilu hanya	Ditentukan	Kertas suara	Kotak suara	Tidak perlu	Tidak wajib	Tidak perlu
Alternatif	ada partai.	ada di level	(secara	diadakan	diadakan	menggaji KPU	buat	biaya 'perahu'.
ala Bung	Siapa saja	desa-	musyawarah	sesuai	sesuai	dari APBD/ APBN,	partai.	Kampanye
Hatta	berhak	kelurahan.	mufakat) oleh	keperluan di	keperluan di	karena pemilu	Tidak perlu	cuma di desa-
	menjadi wakil	Level	wakil rakyat di	tiap desa-	tiap desa-	dilakukan	ada biaya	kelurahan saja.
	rakyat, asal ia	kecamatan	level yang	kelurahan.	kelurahan.	(dibiayai) oleh	khusus	Biaya rendah.
	dipilih mulai	hingga	setara dengan	Distribusi	Distribusi	rakyat sendiri di	untuk buat	
	dari level desa-	nasional diutus	persetujuan	tidak sulit	tidak sulit	desa-kelurahan	partai.	
	kelurahan. dan	(oleh level di	eksekutif di	karena di 1	karena di 1			
	seterusnya	bawahnya)	atasnya.	wilayah desa-	wilayah desa-			
	hingga	secara		kelurahan	kelurahan			
	nasional.	musyawarah		saja.				
		mufakat						

So...?

Apakah sistem Pemilu Bung Hatta akan menghasilkan PEMIMPIN Indonesia yang lebih baik?

Lalu bagaimana?

- Jika dianggap bagus,
 mohon menyebarkan gagasan ini
 minimal KEPADA 5 rekan lainnya
- Kira-kira bagaimana cara untuk merealisasikannya?
- Mari membincangkannya.
 - ► E.mail: <u>pemilu.alternatif@gmail.com</u>